

**BAB II**

**PRAKTIK “SAIKO” DI GHANA DAN PROFIL ENVIRONMENTAL  
JUSTICE FOUNDATION**

*IUU fishing* merupakan suatu masalah serius yang mempengaruhi ekosistem serta mereka yang bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber makanan, gizi, pendapatan, dan dukungan mata pencaharian. Ghana merupakan salah satu negara di dunia yang bergantung pada sektor perikanan terkait pendapatan negara dan jaminan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, hal tersebut dihambat oleh praktik “Saiko” sebagai metode praktik *IUU fishing* yang kerap digunakan oleh para nelayan dan pihak penangkap ikan lainnya di Ghana. Praktik Saiko yang merugikan bagi masyarakat Ghana kemudian mendorong sejumlah organisasi non-pemerintah Ghana, salah satunya Hen Mpoano yang bekerjasama dengan Environmental Justice Foundation (EJF), untuk memfokuskan gerakannya dalam upaya memberantas praktik Saiko di Ghana. Penelitian ini berfokus pada strategi dari EJF sebagai aktor yang melakukan advokasi dalam upaya memberikan tekanan kepada pemerintah Ghana terkait isu *IUU fishing* dan memberantas praktik Saiko di Ghana dengan mengangkat rumusan masalah: bagaimana strategi advokasi transnasional yang dilakukan EJF dalam upaya memberantas praktik penangkapan ikan ilegal Saiko di Ghana?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, dalam bab ini akan dijabarkan empat subbab utama. Subbab pertama akan menjabarkan profil sektor perikanan Ghana dengan mengikutsertakan penjabaran tentang kondisi geografis, kontribusi sektor perikanan Ghana terhadap kehidupan masyarakat Ghana, serta aspek legal

perlindungan sektor perikanan dalam sistem hukum internasional dan nasional Ghana. Selanjutnya, dalam subbab kedua akan diberikan penjelasan terkait praktik Saiko di Ghana beserta pihak-pihak yang terlibat, faktor penyebab, tata cara pelaksanaan, dan implikasi dari praktik Saiko terhadap sektor perikanan Ghana. Subbab ketiga akan memberikan penjabaran terkait profil organisasi non-pemerintah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu EJF. Terakhir, subbab keempat akan memberikan penjelasan singkat terkait upaya pemberantasan praktik Saiko di Ghana.

## **2.1 Profil Sektor Perikanan Ghana**

Ghana terletak di pantai barat Afrika, sekitar 750 km utara khatulistiwa dan antara garis lintang  $4^{\circ}$  Utara dan  $12^{\circ}$  Selatan, serta garis bujur  $3^{\circ}$  Barat dan  $1^{\circ}$  Timur. Dengan luas daratan sekitar  $238.537 \text{ km}^2$ , Ghana memiliki garis pantai sepanjang 550 km dengan batas landas kontinen sepanjang  $23.700 \text{ km}^2$ . Negara penghasil emas terbesar di dunia ini berbatasan dengan Burkina Faso di bagian Utara, Pantai Gading di bagian Barat, Togo di bagian Timur, dan Teluk Guinea di bagian Selatan (dapat dilihat pada Gambar 2.1). Suhu lingkungan Ghana umumnya berada antara  $21\text{-}32^{\circ}\text{C}$  sehingga menjadikan Ghana sebagai negara beriklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau yang berlangsung pada bulan Oktober hingga Maret dan musim penghujan yang berlangsung pada bulan April hingga September (Otumfuo, 2008).

**Gambar 2.1** Peta Ghana



Sumber: Nunoo et al. (2014)

Topografi Ghana yang dipenuhi dengan sungai, laut, dan bendungan menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sektor terpenting dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat Ghana. Bagi pembangunan ekonomi nasional, sektor perikanan Ghana menyumbang kontribusi sejumlah kurang lebih 3-5% dari total PDB dan 5% dari PDB di bidang agrikultur (Amenyogbe et al., 2018; Otumfuo, 2008). Selain itu, sektor perikanan Ghana juga turut memberikan kontribusi terhadap devisa negara melalui kegiatan ekspor komoditas. Negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor yaitu Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Togo, Mali, Pantai Gading, Burkina Faso, Benin, Nigeria, Hong Kong, dan Singapura. Kegiatan ekspor tersebut dilakukan dengan mengklasifikasikan komoditas dari sektor perikanan Ghana sebagai komoditas ekspor non-tradisional (*Non-Traditional Export / NTE*) dan merupakan komoditas

NTE terpenting kedua setelah produk hortikultura yang menyumbang 5% dari total NTE (Otumfuo, 2008).

Berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sektor perikanan Ghana membantu menyediakan lapangan kerja, dukungan mata pencaharian, mengurangi kemiskinan, dan ketahanan pangan. Hasil laut dari sektor perikanan Ghana merupakan sumber utama protein hewani masyarakat Ghana dan dibuktikan dengan rata-rata konsumsi hasil laut per kapita yang mencapai kurang lebih 20-25 kg, lebih tinggi dari rata-rata dunia yaitu 13 kg (Asiama, Abdulai, Dotse, & Addison, 2008). Selain itu, sejumlah sekitar 10% dari populasi atau kurang lebih 1,5-2 juta penduduk Ghana terlibat dalam sektor perikanan Ghana secara langsung atau tidak langsung (Otumfuo, 2008). Dari sisi gender, sektor perikanan juga menjadi sektor yang vital yang mana para pria terlibat dalam kegiatan perikanan utama dan para wanita terlibat dalam kegiatan pasca panen seperti pengolahan dan perdagangan (Amenyogbe et al., 2018).

Jenis-jenis dalam sektor perikanan di Ghana dapat diklasifikasikan menjadi perikanan laut, artisanal, pantai, industri, laguna, dan darat (Asiama et al., 2008). Diantara sekian subsektor perikanan Ghana, subsektor artisanal<sup>1</sup> merupakan subsektor yang terpenting karena menyumbang kurang lebih 60-70% dari produksi hasil laut (Otumfuo, 2008). Ikan yang terdapat pada wilayah perairan Ghana juga secara umum

---

<sup>1</sup> Perikanan artisanal merupakan metode penangkapan ikan berskala kecil yang memanfaatkan teknologi sederhana, modal rendah, dan umumnya dilakukan oleh individu rumah tangga nelayan yang berasal dari kelompok etnis pesisir atau pulau.

diklasifikasikan menjadi spesies ikan pelagis dan demersal<sup>2</sup>. Macam-macam ikan yang terdapat di dalamnya dan penting secara komersial termasuk diantaranya sardinella bulat, sardinella datar, cakalang, tuna sirip kuning (*yellowfin*), *bumper*, dan tenggiri. Selain itu, spesies ikan yang umumnya terdapat di wilayah perairan Ghana adalah *lujanidae* (kakap), *serranidae* (kerapu), dan *polynemidae* (kuro atau yang biasa dikenal juga dengan sebutan *threadfin*) (Asiama et al., 2008).

Hasil yang didapatkan dari sektor perikanan Ghana diperoleh dari hampanan perairan yang mencakup sungai, laguna, dan danau yang menjadi pondasi dari industri perikanan Ghana. Sumber utama air tawar Ghana adalah Danau Volta, waduk yang awalnya dimaksudkan untuk proyek irigasi serta air minum, dan kolam ikan. Danau Volta yang memiliki luas permukaan 8.480 km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang 4.200 km merupakan penyumbang sekitar 90% dari total produksi perikanan di Ghana. Selain Danau Volta, hasil laut Ghana juga didapatkan dari Laguna Keta yang memiliki luas permukaan 330 km<sup>2</sup> dan lebih dari 50 badan air payau yang menghiasi garis pantai (FAO, 2016b).

Hasil laut dari sektor-sektor perikanan Ghana didapatkan dari sejumlah metode penangkapan ikan seperti metode penangkapan artisanal, semi-industri, dan industri. Metode penangkapan artisanal merupakan jenis sistem perikanan pada pantai terbuka dengan menggunakan alat dan

---

<sup>2</sup> Ikan demersal adalah spesies ikan yang biasanya ditemukan di dekat dan tepat di bawah dasar laut (laut dalam).

metode penangkapan yang sangat mendasar seperti penggunaan perahu gali (kano) dan seringkali dilakukan pada hampir 200 desa nelayan di sepanjang garis pantai Ghana. Metode penangkapan ikan ini menyumbangkan sekitar 70-80% dari total volume tangkapan ikan laut tahunan yang sebagian besar terdiri dari spesies ikan pelagis kecil dan beberapa spesies ikan demersal (Asiama et al., 2008). Selanjutnya, metode penangkapan semi industri (*inshore*) menggunakan kapal kayu buatan warga lokal yang berukuran panjang 9-12 meter dan menghasilkan sekitar 2% dari total tangkapan laut. Hasil tangkapan dari metode ini terdiri dari sejumlah spesies demersal seperti udang dan sotong yang ditangkap selama musim *upwelling*<sup>3</sup> (Asiama et al., 2008). Terakhir, metode penangkapan ikan industri (*offshore* atau perairan lepas pantai) merupakan metode penangkapan yang beroperasi di perairan Ghana dan terbatas pada kedalaman antara 50 sampai dengan 75 meter. Namun, seringkali mereka berlayar pada wilayah perairan dangkal. Secara keseluruhan, metode penangkapan industri menyumbang sekitar 6% dari total volume tangkapan laut yang termasuk di dalamnya *cephalopoda* (cumi-cumi, gurita, dan sotong) yang dibekukan di laut untuk diekspor (Asiama et al., 2008).

Perkembangan akuakultur di Ghana dilakukan dengan melibatkan sejumlah lembaga dan/atau badan seperti Kementerian Perikanan dan Pengembangan Budidaya (MoFAD), Komisi Perikanan (FC), Water

---

<sup>3</sup> Kondisi pada saat air dingin yang berada pada laut kedalaman naik ke permukaan laut.

Research Institute (WRI), Environmental Protection Agency (EPA), Universitas dan Water Research Council (WRC), serta berbagai lembaga perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Ghana, Universitas Cape Coast, Universitas Sumber Daya Alam dan Energi (UENR), Universitas Sains dan Teknologi Kwame Nkrumah, serta Universitas Studi Pembangunan. Sampai dengan saat ini, tidak ada lembaga dan/atau badan swasta yang terlibat dalam upaya perkembangan akuakultur Ghana. WRI merupakan satu-satunya lembaga penelitian publik yang diberikan mandat untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuakultur. Mereka mengoperasikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Budidaya serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan sistem produksi akuakultur dan memberikan berbagai dukungan teknis terhadap sektor akuakultur, termasuk penjualan benih ikan kepada petani. (Amenyogbe et al., 2018).

Terkait regulasi, pemerintah Ghana telah mengembangkan dan menerapkan undang-undang terkait perkara perikanan sejak kemerdekaannya. Kerangka hukum pengelolaan sektor perikanan Ghana tertulis pada berbagai pasal dalam perundang-undangan dan berbagai perjanjian perikanan internasional. Hingga saat ini, undang-undang yang dijadikan dasar dalam pengelolaan sektor perikanan Ghana adalah Undang-Undang Perikanan 2002 (UU 625) yang secara umum mengatur tentang pengaturan dan pengelolaan perikanan; pengembangan industri perikanan dan eksploitasi sumber daya perikanan yang berkelanjutan; dan

hal-hal lain yang sekiranya berkaitan dengan sektor perikanan Ghana. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kementerian Perikanan dan Pengembangan Budidaya (MoFAD) bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya dan pengembangan sektor perikanan Ghana. Pelaksanaan berbagai program dan langkah kebijakan pada Undang-Undang Perikanan 2002 difokuskan pada peningkatan sumber daya laut dan menjaga ekosistem laut yang dapat membantu kelanjutan sumber daya yang jumlahnya sudah berkurang drastis akibat eksploitasi yang tidak bertanggungjawab atau bahkan habis (Alabi-Doku, Chen, Ampofo-Yeboah, & Asiedu, 2020).

Selain itu, pemerintah Ghana juga berupaya untuk mengelola sektor perikananannya melalui hubungan kerjasama dengan organisasi regional dan internasional maupun menandatangani dan/atau meratifikasi sejumlah perjanjian internasional. UNCLOS<sup>4</sup>, UN *Fish Stocks Agreement*<sup>5</sup> dan FAO *Port State Measures Agreement*<sup>6</sup> merupakan sejumlah perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Ghana. Selanjutnya, Ghana juga merupakan anggota dari organisasi internasional International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)<sup>7</sup> dan organisasi regional Fisheries Committee for the West Central Gulf of Guinea (FCWC)<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Ghana menandatangani UNCLOS pada 10 Desember 1982 dan meratifikasinya pada 7 Juni 1983.

<sup>5</sup> Ghana menjadi salah satu negara yang meratifikasi UN *Fish Stock Agreement* sejak 27 Januari 2017.

<sup>6</sup> Ghana menjadi salah satu dari 69 negara yang menandatangani FAO *Port State Measures Agreement* pada 28 Oktober 2010 dan meratifikasinya pada 29 November 2016.

<sup>7</sup> Ghana merupakan salah satu dari 52 negara yang menjadi pihak dalam ICCAT sejak 17 April 1968.

<sup>8</sup> Ghana, bersama dengan 6 negara Afrika Barat lainnya membentuk FCWC pada tahun 2007.



Berdasarkan pada regulasi yang diatur dalam UNCLOS dan perjanjian-perjanjian internasional yang mana Ghana menjadi pihak, pemerintah Ghana juga mengadopsi *The International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU) sejak tahun 2001 lalu (FAO, 2001).

Sampai saat ini, pemerintah Ghana pun tetap mengembangkan kerangka kerjasama regional dengan menetapkan jalur komunikasi yang jelas dan koordinatif dengan negara-negara lain di dunia (FAO, 2001b). Meskipun demikian, upaya pengelolaan sektor perikanan yang dilakukan oleh pemerintah Ghana masih dapat dikatakan tidak efektif karena adanya serangkaian masalah pada sektor perikanan Ghana yang salah satunya adalah maraknya praktik penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (*IUU fishing*) (Alabi-Doku et al., 2020).

## **2.2 Praktik “Saiko” di Ghana**

Diantara sekian banyak metode penangkapan ikan, salah satu metode yang paling sering dipraktikkan di Ghana ialah *Transshipment* atau atau “Saiko”. Saiko merupakan istilah yang kerap digunakan dalam industri perikanan Ghana untuk merujuk pada kegiatan *IUU fishing* di Ghana dan telah berlangsung selama kurang lebih tiga dekade (Baidoo-Tsibu, 2019). Sejarah kata “Saiko” (最高; berarti “baik” dalam Bahasa Indonesia) sendiri datang dari kapal pukat industri Jepang yang membuang hasil tangkapan mereka yang dinilai tidak berguna sehingga

dibuang ke laut untuk menyediakan ruang penyimpanan untuk ditukar dengan makanan dan barang berharga lainnya (Aheto et al., 2020). Pada awalnya, praktik Saiko hanya dilakukan dalam bentuk barter. Namun, praktik tersebut telah berkembang menjadi sebuah industri yang dimanfaatkan oleh banyak orang untuk meraup keuntungan (EJF & Hen Mpoano, 2019c).

Praktik Saiko pada awalnya juga hanya merupakan kegiatan pembelian tangkapan sampingan yang tidak diinginkan dari kapal-kapal industri. Hal tersebut kemudian membantu memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan bagi komunitas-komunitas pesisir pada musim tangkapan rendah. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Saiko menjadi berkembang menjadi sebuah industri tersendiri. Kapal-kapal industri yang terlibat dalam praktiknya juga tidak hanya menargetkan spesies demersal yang diizinkan seperti ikan kerapu, kakap, dan gurita tetapi ikan-ikan yang juga merupakan spesies tangkapan para nelayan artisanal (EJF & Hen Mpoano, 2019c).

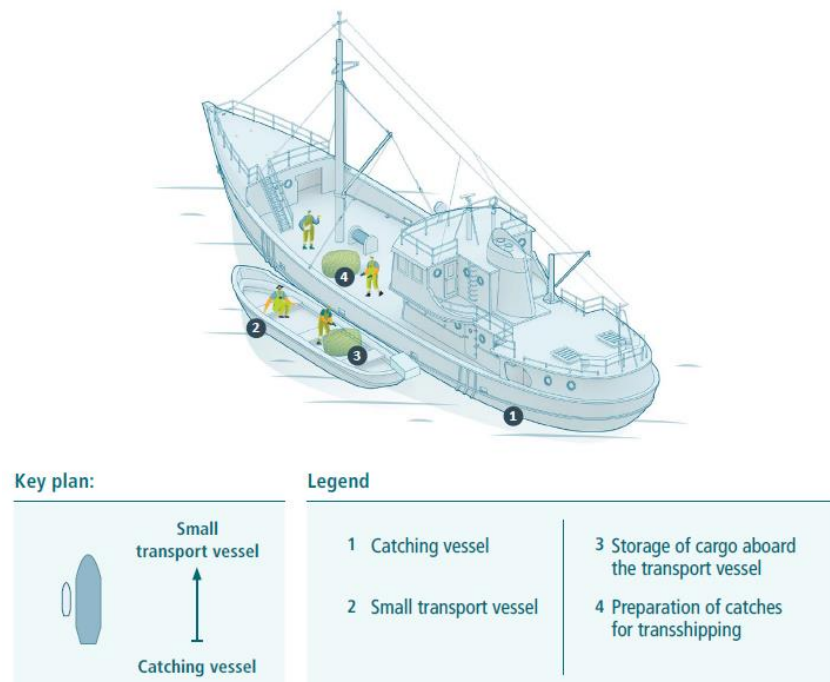
Secara garis besar, terdapat lima jenis utama praktik *transshipment*. Kelima jenis praktik *transshipment* dibedakan dengan melihat praktik pemindahan hasil tangkapan dari kapal penangkap ke kapal kargo berpendingin (*Reefer*)<sup>9</sup>, ke peti kemas (*containers*)<sup>10</sup>, ke kapal pengangkut

---

<sup>9</sup> Praktik *transshipment* ke kapal *Reefer* seringkali terjadi di laut atau wilayah pelabuhan dan teridentifikasi berkaitan dengan penangkapan tuna, cumi-cumi, spesies campuran yang ditangkap oleh kapal pukat hela dasar laut, ikan pelagis kecil, dan kril (Mosteiro Cabanelas et al., 2020).

kecil (Saiko), ke kapal penyimpanan terapung, atau ke kapal penangkap lainnya. Berdasarkan laporan yang diterima di Thailand, negara-negara di kawasan Amerika Latin, dan negara-negara di kawasan Afrika Barat (termasuk Ghana), tipe praktik *transshipment* yang seringkali terjadi di Ghana adalah praktik pemindahan hasil tangkapan dari kapal penangkap ke kapal penangkut kecil atau Saiko (Mosteiro Cabanelas et al., 2020). Skema praktik Saiko dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.2 sebagai berikut.

**Gambar 2.2** Skema Praktik Penangkapan Ikan Ilegal Saiko



Sumber: FAO (2020)

Berdasarkan gambaran di atas, praktik Saiko dilakukan dengan kapal penangkap ikan yang bekerja di wilayah perairan nasional

<sup>10</sup> Praktik *transshipment* ke *containers* seringkali dilaporkan terjadi di wilayah Amerika Latin, Afrika Barat, Afrika Selatan, Eropa, Karibia, dan Asia. Praktik ini juga diidentifikasi berkaitan dengan penangkapan tuna, ikan pelagis besar, cumi-cumi, dan spesies campuran lainnya yang ditangkap oleh kapal pukat harimau (Mosteiro Cabanelas et al., 2020).

melakukan pemindahan hasil tangkapan mereka ke kapal pengangkut kecil atau bahkan kapal penangkap ikan lainnya agar tangkapannya tidak perlu melalui hasil pemeriksaan sehingga kapal penangkap ikan utama dapat terbebas dari tanggungan biaya bea dan cukai. Metode penangkapan ikan yang digunakan pun mencakup penyelaman (MDV) dan penggunaan pukot cincin (PS)<sup>11</sup>, perangkap pot (FPO)<sup>12</sup>, serta kapal pukot hela dasar berpapan (OTB) (FAO, 2014a; Mosteiro Cabanelas et al., 2020).

Meskipun tidak dapat dipastikan siapa pelaku praktik Saiko, pada tahun 2019 lalu pemerintah Ghana berhasil menangkap kapal asal Tiongkok, Lu Rong Yuan Yu 956, yang telah diberikan izin untuk menangkap ikan di wilayah perairan Ghana dan dioperasikan oleh perusahaan Rongcheng Ocean Fishery Co Ltd (Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China, 2018) sebagai salah satu pelaku praktik Saiko di wilayah perairan Ghana. FC Ghana pada saat itu telah memverifikasi bahwa kapal Lu Rong Yuan telah melabuh di pelabuhan Tema tetapi tidak melaporkan sebagian hasil tangkapannya yang kemudian dimaksudkan untuk menjadi produk Saiko. Kapal lainnya<sup>13</sup> yang dioperasikan oleh perusahaan Rongcheng Ocean Fishery Co Ltd juga beberapa kali telah dilaporkan atas keterlibatannya dalam praktik penangkapan ikan ilegal di Ghana (EJF, 2021a).

---

<sup>11</sup> Pukat Cincin atau *Purse Seine* merupakan alat penangkap ikan berupa dinding jaring besar yang terpasang di sekitar area kumpulan ikan.

<sup>12</sup> Perangkap Pot merupakan alat penangkap ikan berbentuk kawat tiga dimensi atau perangkat kayu yang memungkinkan organisme untuk masuk ke dalam kandang tetapi membuat pelarian menjadi sulit atau tidak mungkin.

<sup>13</sup> Kapal lainnya yang dioperasikan oleh perusahaan Rongcheng Ocean Fishery Co Ltd antara lain kapal Lu Rong Yuan Yu 906, 907, 908, 916, 920, 967, 968, dan 969.

Selain itu, kapal penangkap ikan asal Tiongkok lainnya bernama Meng Xin yang dioperasikan oleh perusahaan Dalian Mengxin Ocean Fishery Co. Ltd dan menangkap ikan dengan menggunakan bendera Ghana juga beberapa kali telah ditangkap atas dugaan pelanggaran terkait perikanan yang salah satunya ialah praktik Saiko (dapat dilihat pada Tabel 2.1) (Samari, 2019). Pada Februari 2019 lalu, praktik Saiko yang dilakukan oleh kapal Meng Xin pun terekam oleh tim EJF di sekitar 12 mil dari pantai Wilayah Tengah Ghana (EJF, 2021a).

**Tabel 2.1** Bentuk Pelanggaran oleh Kapal Meng Xin tahun 2013-2019

No.	Waktu	Kapal	Dugaan / Dakwaan Pelanggaran	Sanksi
1	Desember 2013	Meng Xin 5	Praktik Saiko	Denda sebanyak GH¢346.790
2	April 2015	Meng Xin 16	Penangkapan ikan usia remaja	Denda sebanyak GH¢25.600 dan US\$60.000
3	Juli 2015	Meng Xin 2	Penggunaan <i>Chafers</i> sisi atas	Denda sebanyak GH¢3.000
4	Juni 2018	Meng Xin 2	Pembuangan ikan	Denda sebanyak GH¢126.000
5	Agustus 2018	Meng Xin 29	Penemuan ikan usia remaja	Denda sebanyak GH¢500.000
6	Februari 2019	Meng Xin 29	Pembuangan ikan	Belum dijatuhkan sanksi <sup>14</sup>
7	Februari 2019	Meng Xin 10	Dugaan praktik Saiko	Belum dijatuhkan sanksi <sup>15</sup>

Sumber: Friends of the Nation (2015)

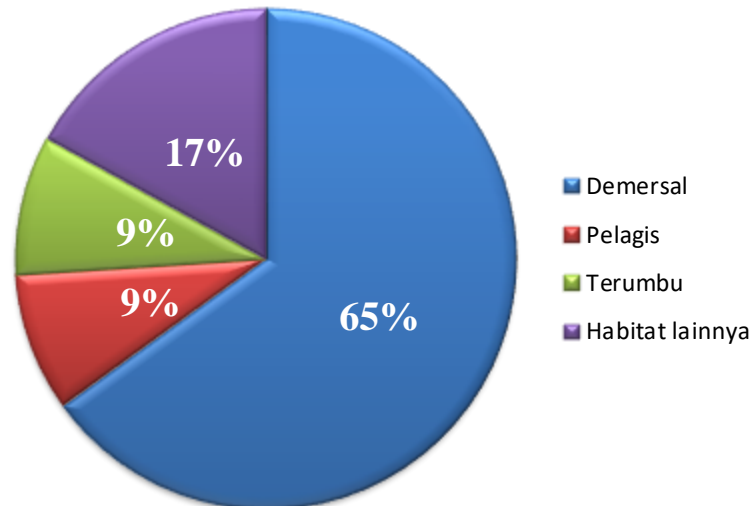
<sup>14</sup> Status kasus masih menunggu sidang oleh komite penyelesaian di luar pengadilan (EJF, 2021a).

<sup>15</sup> Rekaman aktifitas kapal diperoleh EJF selama pelaksanaan pemantauan di wilayah perairan Ghana (EJF, 2021a).

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan, nilai hasil laut Ghana meningkat dari USD\$147,67 juta menjadi USD\$254,64 juta dari tahun 2002 sampai dengan 2014. Namun, jumlah ikan artisanal yang didaratkan menurun dari 207.070 ton pada tahun 2002 menjadi 198.660 ton pada tahun 2014. Selain itu, jumlah ikan industri juga menurun dari 209.770 ton pada tahun 2002 menjadi 169.930 ton pada tahun 2014. Dari penurunan total produksi sektor perikanan Ghana, praktik Saiko disebut-sebut sebagai faktor utama fenomena tersebut. Praktik Saiko juga menjadi salah satu faktor negara-negara di wilayah pesisir Afrika Barat kehilangan sejumlah kurang lebih USD\$2,3 miliar per tahun karena praktiknya yang menyebabkan program dan kebijakan yang diterapkan untuk mengelola sumber daya laut oleh pemerintah masing-masing negara tidak dapat terlaksana dengan efektif (Alabi–Doku et al., 2020).

Tidak hanya itu, praktik *IUU fishing* yang berlangsung juga menyebabkan adanya kesenjangan yang besar dalam kesetaraan distribusi aliran keuntungan dan ketidakseimbangan kekuatan dalam sektor perikanan Ghana. Dapat dikatakan demikian karena praktik Saiko memungkinkan kapal pukat industri untuk mencuri ikan dari para nelayan skala kecil secara terus menerus dan kemudian menjualnya kembali kepada mereka (EJF & Hen Mpoano, 2019c). Klasifikasi habitat spesies ikan yang kerap menjadi sasaran dari praktik Saiko di Ghana pun dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut.

**Grafik 2.1** Klasifikasi Habitat Spesies Ikan Tereksploitasi dalam Praktik Saiko

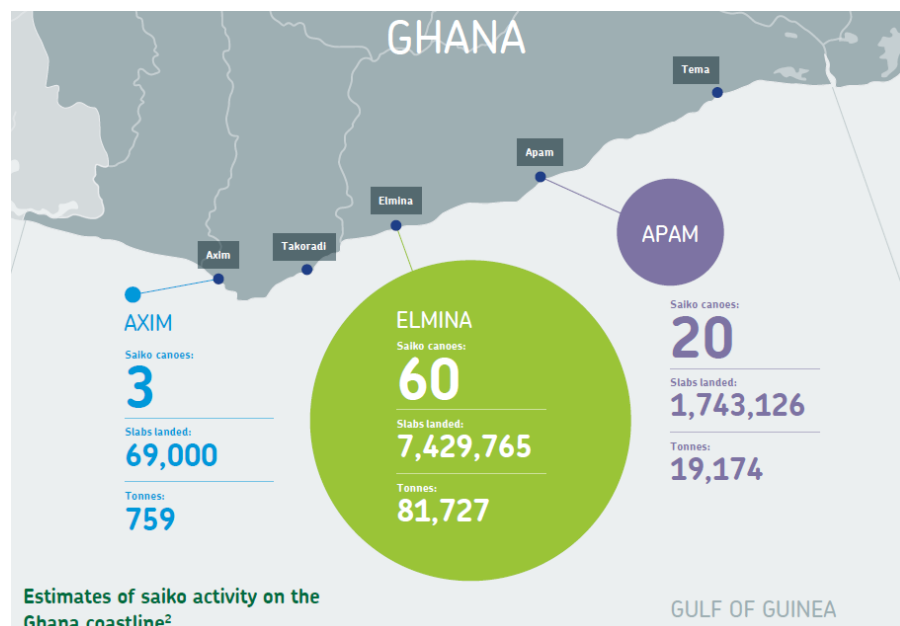


Sumber: Aheto et al. (2020)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 65% atau 44 spesies demersal merupakan spesies yang dominan untuk dieksploitasi. Kemudian, disusul dengan masing-masing 6 spesies (9%) dari habitat pelagis dan habitat terumbu yang juga dominan untuk dieksploitasi dalam praktik Saiko di Ghana. Secara keseluruhan, sejumlah kurang lebih 68 spesies ikan yang terdiri dari ikan bersirip dan kerang pelagis; demersal; terumbu; pelagis bentik; ikan layang bulat (*Decapterus Punctatus*), tenggiri (*Caranx Rhonchus*); sarden bulat (*Sardinella Aurita*), serta; pandora merah (*Pagellus Bellotti*) merupakan spesies yang secara numerik dominan untuk dieksploitasi. Sebagai akibat dari kegiatan eksploitasi berlebihan dalam praktik Saiko, sebanyak kurang lebih 6 spesies (10%) yang tercatat dikategorikan sebagai spesies yang rentan atau hampir terancam dalam daftar merah spesies terancam The International Union for Conservation of Nature (IUCN) (Aheto et al., 2020).

Meskipun dikategorikan sebagai salah satu wujud *IUU fishing*, efek yang diberikan dari praktik Saiko digambarkan sebagai ‘pedang bermata dua’ karena kemampuannya untuk memberikan keuntungan pada satu sisi dan memberikan kerugian pada sisi lainnya. Pada satu sisi, tangkapan sampingan yang merupakan hasil dari praktik Saiko dianggap sebagai harta karun bagi nelayan (Nunoo, Boateng, Ahulu, Agyekum, & Sumaila, 2009). Selain itu, praktik Saiko juga menyediakan lapangan kerja langsung bagi kurang lebih 15.400 warga negara Ghana di tiga lokasi utama praktik Saiko yaitu Elmina, Apam, dan Axim (dapat dilihat pada Gambar 2.3) (EJF & Hen Mpoano, 2019c). Meskipun demikian, praktik Saiko juga dikatakan sebagai kontributor utama yang menyebabkan keruntuhan stok ikan di wilayah perairan dan mengancam ketahanan pangan warga negara Ghana (Lazar et al., 2018).

**Gambar 2.3** Lokasi Utama Praktik Saiko di Ghana



Sumber: FCWC (2021)



Saiko merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilarang di Ghana menurut Undang-Undang Perikanan 625 Tahun 2002. Larangan atas Saiko juga dipertegas dalam Peraturan Perikanan 2010 (L.I 1968) (Aheto et al., 2020). Penegakkan Undang-Undang Perikanan 625 Tahun 2002 juga dijamin dengan adanya penjatuhan denda antara US\$100.000 sampai dengan US\$2 juta bagi para pelanggar. Denda minimum dari undang-undang tersebut pun dapat meningkat menjadi US\$1 juta apabila tangkapannya mencakup ikan usia muda atau didapatkan dengan menggunakan jenis-jenis alat tangkap yang dilarang. Meskipun undang-undang yang diterapkan telah secara jelas melarang dilakukannya praktik Saiko, resiko penangkapan dan pemberian sanksi atas pelanggarnya masih relatif rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kasus yang umumnya diselesaikan melalui proses di luar pengadilan yang buram dan tidak ada contoh yang diketahui terkait denda minimum dalam undang-undang yang harus dibayarkan. Selain itu, sebagian besar pelaku praktik Saiko juga terikat dengan kapal milik asing sehingga penangkapannya bertentangan dengan hukum Ghana (EJF & Hen Mpoano, 2019c).

Selain upaya penegakan hukum yang tidak efektif, penurunan stok ikan drastis di Zona Ekonomi Eksklusif Ghana sebagai akibat dari eksploitasi yang berlebihan juga menjadi penyebab dari maraknya praktik Saiko di Ghana. Hal tersebut menjadikan para nelayan untuk cenderung menggunakan metode ilegal untuk menangkap ikan. Di saat yang bersamaan, jumlah kapal industri, semi-industri, dan/atau artisanal turut

meningkat dengan drastis sehingga berimplikasi kepada peningkatan kapasitas penangkapan ikan. Kedua fenomena yang terjadi pada saat yang bersamaan kemudian menguras stok ikan lebih banyak (Afoakwah et al., 2018).

Di luar kedua alasan utama mengapa praktik Saiko marak terjadi di Ghana, sektor perikanan tetap menjadi sumber protein utama dan yang paling terjangkau. Hal tersebut kemudian menjadikan hasil laut sebagai komoditas yang paling diminati. Namun, dengan dibutuhkannya sumber daya yang besar untuk menangkap ikan secara legal, para nelayan pelaku Saiko cenderung lebih memilih untuk menangkap ikan secara ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal dinilai membutuhkan sumber daya dan pengeluaran yang lebih kecil, tetapi dapat memberikan hasil yang lebih banyak dan membawa keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan para nelayan yang menangkap ikan dengan metode legal. Pemilihan metode penangkapan tersebut juga kemudian menjadikan ikan tangkapan ilegal lebih murah sehingga para nelayan terpaksa untuk melakukan praktik Saiko guna mengikuti persaingan (Afoakwah et al., 2018).

Dengan demikian, Saiko merupakan praktik yang harus dihentikan dengan mengupayakan penegakan hukum yang tegas dan penerapan kebijakan yang dapat membantu para nelayan untuk tidak memilih metode *IUU fishing* guna mendapatkan hasil laut. Dengan dihentikannya praktik Saiko pula, berarti pengelolaan sektor perikanan Ghana yang efektif dan

menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat diwujudkan.

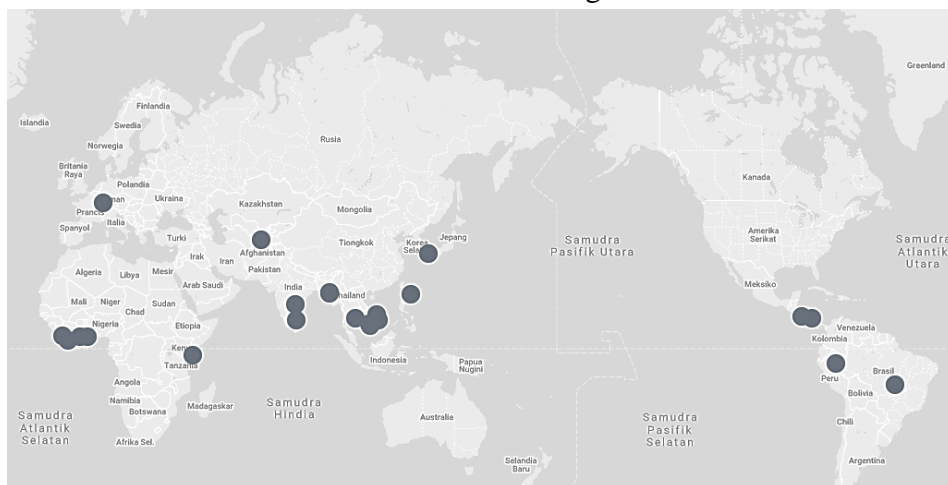
### **2.3 Profil Environmental Justice Foundation**

Praktik Saiko dan pengaruhnya terhadap sektor perikanan Ghana menarik perhatian sejumlah organisasi domestik maupun internasional, yang salah satunya adalah Environmental Justice Foundation atau EJF. EJF merupakan organisasi nonprofit yang didirikan oleh Steve Trent dan Juliette Williams di London, Inggris pada tahun 2000 (EJF, 2009). Latar belakang dari didirikannya EJF adalah penderitaan kelompok-kelompok yang relatif rentan terhadap dampak degradasi lingkungan yang terus meningkat, sesuai pengamatan dari kedua pendiri yang merupakan advokator isu lingkungan selama mereka bekerja di bidang kampanye lingkungan hidup.

Dengan latar belakang yang disebutkan, EJF kemudian bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai nirkekerasan dalam rangka mengatasi isu-isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan isu lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah lingkungan di negara-negara berkembang. Untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut, EJF bekerja dengan mengkampanyekan kondisi yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan (*vulnerable communities*) pada ranah internasional sebagai upaya perlindungan hak-hak mereka atas sandang, pangan, dan papan serta memutus keberlangsungan degradasi lingkungan lebih lanjut.

Dengan demikian dapat dirangkum bahwa secara keseluruhan, EJF menjalankan berbagai program kampanye yang berfokus pada isu-isu: (1) *IUU fishing*; (2) Produksi kapas; (3) *Climate refugees*<sup>16</sup>; (4) *Aquaculture*<sup>17</sup>, dan; (5) Penggunaan pestisida. Kegiatan advokasi EJF juga terfokus pada negara-negara berkembang di kawasan Afrika (Ghana, Kenya, dan Sierra Leone), Amerika Selatan (Brazil, Peru, dan Meksiko), Asia Selatan (Bangladesh, India, dan Pakistan), serta Asia Tenggara (Filipina, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Vietnam) (EJF, 2019d). Kegiatan advokasi EJF pun juga telah menyebar ke berbagai penjuru dunia seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut.

**Gambar 2.4** Persebaran Organisasi EJF



Sumber: EJF (2019)

Dalam keberlangsungannya, EJF percaya bahwa keamanan lingkungan merupakan dasar HAM sehingga EJF berdedikasi untuk

<sup>16</sup> *Climate refugees* merupakan orang-orang yang terpaksa untuk meninggalkan daerah asal mereka karena adanya perubahan kondisi lingkungan yang mendadak atau berlangsung dalam jangka panjang.

<sup>17</sup> *Aquaculture* dapat diartikan sebagai budidaya pemeliharaan atau produksi ikan dan hewan air lainnya serta spesies tanaman di bawah kondisi yang dapat dikendalikan.

mengakhiri segala bentuk degradasi lingkungan dan ketidakadilan melalui kreativitas, inovasi, dan upaya lainnya yang dinilai dapat membantu membawa perubahan. EJF juga berupaya untuk turut serta memberikan keadilan, perlindungan, serta penghormatan kepada kelompok-kelompok marjinal yang rentan terhadap degradasi lingkungan dan berkomitmen untuk membantu membangun kapasitas dari akar rumput untuk melindungi HAM dan lingkungan dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut dilakukan oleh EJF melalui prinsip-prinsip nirkekerasan dan pendiriannya bersifat independen, yang artinya bebas dari afiliasi politik dan keagamaan apapun. Segala bentuk donasi atau pemberian dari lembaga-lembaga politik dan keagamaan pun tidak akan diterima oleh EJF karena dinilai akan berdampak kepada integritas, tujuan, nilai-nilai yang dianut, dan keindependennya. Dalam menjalankan pekerjaannya, semua kegiatan EJF juga bersifat transparan, akuntabel, dan menjalankan prinsip non-diskriminasi (EJF, 2009).

Berdasarkan pada visinya, *“Protecting People and Planet”*, EJF percaya adanya hubungan secara langsung antara konsep HAM dengan keamanan lingkungan. Visi tersebut kemudian diwujudkan melalui serangkaian misi yang turut mencakup: perlindungan atas lingkungan dan masyarakat yang rentan; penciptaan dan pengimplementasian solusi-solusi atas isu yang dihadapi masyarakat yang rentan melalui pelatihan kepada komunitas, melakukan investigasi atas kasus pelanggaran HAM dan pengrusakan lingkungan, dan publikasi hasil investigasi; penyediaan

pelatihan penggunaan teknologi ramah lingkungan, penelitian, advokasi, dan pelatihan dokumentasi; memanfaatkan media untuk menyediakan panggung politik dan publik agar tercipta perubahan yang membangun, serta; berkampanye untuk mewujudkan kesadaran internasional atas berbagai isu lokal (EJF, 2015b).

Dari visi dan misinya, EJF kemudian berupaya untuk mewujudkannya melalui empat fokus kerja, yaitu investigasi, kampanye, aksi akar rumput, dan menjadi katalisator. Dalam investigasinya, EJF mengamati dan membentuk laporan mendalam terkait kerusakan lingkungan di negara-negara berkembang. Hasil investigasi tersebut kemudian dipublikasikan dalam bentuk film dokumenter dan/atau laporan. Dalam rentang tahun 2001 sampai dengan 2009, EJF telah melakukan investigasi di lebih dari 20 negara dan berhasil menghasilkan sebanyak 23 laporan (EJF, 2018b).

Selanjutnya, EJF melakukan kampanye untuk membantu masyarakat yang rentan untuk menyuarakan nasibnya dalam skala nasional maupun internasional. Hal tersebut dilakukan agar nasib mereka dapat didengar dan diketahui oleh para pembuat kebijakan. Media yang paling sering digunakan oleh EJF dalam berkampanye adalah film dokumenter. EJF sendiri telah memenangkan sejumlah penghargaan atas karya filmnya seperti penghargaan Film Pendek Terbaik dalam *8<sup>th</sup> International Festival of Environmental Film and Video* di Brazil untuk film dokumenter EJF yang berjudul “White Gold-True Cost of Cotton” dan penghargaan

Dokumenter Edukasi Lingkungan Terbaik serta *Honourable Mention* pada ajang Festival Perfilman CineEco di Portugal (EJF, 2018b).

Kemudian, melalui aksi akar rumput, EJF berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang sekiranya tertarik untuk menjadi *grassroot campaigners*<sup>18</sup> dengan memberikan pelatihan serta peralatan yang dibutuhkan agar dapat melakukan aksi kampanye dengan efektif dalam ranah domestik (EJF, 2018b).

Terakhir, EJF menjalankan perannya sebagai pihak yang mengadvokasi isu HAM dan lingkungan dengan menjadi katalisator. Peran ini ditujukan untuk membantu mewujudkan perubahan untuk jangka panjang dalam dua domain isu tersebut. Sebagai katalisator, EJF berperan untuk memberi peringatan terhadap pemerintah, pembuat kebijakan internasional, konsumen, maupun sektor bisnis terhadap isu pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara berkembang. Kerusakan yang dimaksud dalam konteks ini ialah kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari upaya pemenuhan permintaan negara maju atas sumber pangan dan tenaga kerja murah dari negara berkembang (EJF, 2018b).

Terkait dengan upaya menghentikan praktik Saiko di Ghana, EJF telah memulai advokasinya sejak tahun 2005 dengan melakukan

---

<sup>18</sup> *Grassroot campaigners* dapat diartikan sebagai orang-orang yang melangsungkan aksi kampanye dari ranah lokal untuk memberikan pengaruh terhadap perubahan pada ranah lokal, regional, nasional, maupun internasional.

investigasi besar-besaran terkait praktik penangkapan ikan ilegal di Pantai Barat Afrika dan menghasilkan laporan yang berjudul *Pirates and Profiteers*. Kemudian pada tahun 2013, kampanye EJF berhasil menjadi salah satu pendorong Uni Eropa untuk mengeluarkan larangan perdagangan *seafood* dari negara-negara yang terlibat dalam *IUU fishing*, yang salah satunya adalah Ghana. Pada akhirnya pada tahun 2017, EJF bekerjasama dengan NGO lokal Hen Mpoano untuk menjalankan proyek bernama *Far Dwuma Nkodo* selama tiga tahun dengan tujuan untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan dan menghentikan praktik Saiko (EJF, 2015a, 2018b).

#### **2.4 Upaya Pemberantasan Praktik “Saiko” di Ghana**

Ghana merupakan salah satu negara di dunia yang bergantung pada sektor perikananannya. Hal tersebut tercermin dari sektor perikanan Ghana yang menghasilkan komoditas ekspor non-tradisional terpenting kedua Ghana dan menjadi penyedia lapangan kerja serta stok pangan bagi warga negara Ghana. Terkait pengelolannya, pemerintah Ghana telah menerapkan Undang-Undang Perikanan 2002 (UU 625) serta menandatangani dan/atau meratifikasi sejumlah perjanjian internasional. Upaya pengelolaan sektor perikanan Ghana pun juga dilanjutkan dengan pemerintah Ghana yang tetap mengembangkan kerangka kerjasama regional. Meskipun demikian, upaya pengelolaan sektor perikanan yang dilakukan oleh pemerintah Ghana masih menjumpai sejumlah hambatan



yang salah satunya ialah maraknya praktik penangkapan ikan yang ilegal, tidak diregulasi, dan tidak dilaporkan (*IUU fishing*).

Salah satu bentuk praktik *IUU fishing* yang marak terjadi di Ghana adalah *transshipment* atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan “Saiko”. Keresahan yang timbul sebagai akibat dari maraknya praktik Saiko terhadap sumber mata pencaharian dan ketahanan pangan kemudian mendorong organisasi non-pemerintah (NGO) lokal Ghana, Hen Mpoano, untuk mengadvokasikan urgensi pemberantasan praktik Saiko di Ghana. Upaya yang dilakukan oleh Hen Mpoano pun terhambat karena adanya limitasi dari pemerintah Ghana yang tidak menjadikan pemberantasan praktik Saiko sebagai prioritas utama dalam penerapan kebijakannya. Menanggapi hal tersebut, Hen Mpoano kemudian memanfaatkan kontak internasional dan menjalin hubungan kerjasama dengan NGO internasional asal Inggris yaitu Environmental Justice Foundation (EJF). Hubungan kerjasama yang dijalin antara Hen Mpoano dan EJF ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, memberikan tekanan kepada pemerintah Ghana untuk mengubah perilaku, dan menerapkan kebijakan yang dapat membantu pemberantasan praktik Saiko di Ghana. Upaya EJF dalam mengadvokasikan isu praktik Saiko di Ghana pun dilakukan dengan melakukan sejumlah strategi yang akan dijelaskan dalam pembahasan BAB III.